



TAHUN 2023

RENCANA KERJA **PERUBAHAN**

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan berkat dan rahmat-Nya sehingga dapat diselesaikannya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 dimana Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 mengacu pada Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah 2018–2023, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Matriks Rencana Kerja Tahun 2023 disusun menyesuaikan pagu anggaran yang telah ditentukan serta telah menyesuaikan perubahan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2023 serta dapat mencapai hasil yang baik dalam pengembangan dalam bidang kepegawaian di Provinsi Kalimantan Barat yang kedepanya dapat diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunannya.

Pontianak, 2023

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Barat,



Drs. ANI SOFIAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650602 198603 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.3.1 Maksud.....	4
1.3.2 Tujuan	4
1.4 Sistematika Dokumen Perubahan Renja.....	5
BAB 2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	6
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	19
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	33
III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	33
III.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	34
III.3 Program dan Kegiatan	35
Bab 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	36
Bab 5 PENUTUP	49

LAMPIRAN

- Perubahan Renja BKD. Prov. Kalbar TA. 2023

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021.....	7
Tabel 2. Capaian Target IKU BKD Prov. Kalbar Tahun 2021	15
Tabel 3. Target dan Capaian Target IKU BKD Prov. Kalbar Tahun 2019– 2021	17
Tabel 4. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023	22
Tabel 5. Hasil Penginputan Rancangan awal dan Rincian Renja 2023 BKD Prov. Kalbar.....	37

BAB1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD dimana sistematika penyusunannya disusun berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan melalui tahap persiapan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; perumusan rancangan akhir; penetapan Renja Perangkat Daerah; dan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 serta Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 yang telah ditetapkan dengan mengakomodir visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Dalam proses penyusunan Perubahan Renja ini telah disesuaikan dengan perubahan nomenklatur Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar yang telah ditetapkan pada Tahun 2021 yang tertuang pada Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 136) serta hasil rapat-rapat kerja atau koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian yang melibatkan instansi dan stakeholder terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, penyusunan Perubahan Renja ini memperhatikan hasil kinerja program/kegiatan yang telah dicapai

pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis, mempertimbangkan sinergi antar sektor, koordinasi antar OPD baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya.

Selanjutnya, Perubahan Renja Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 yang merupakan pelaksanaan tahun ke-lima RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dimana mengakomodir 2 (dua) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan yang mencakup :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Kepegawaian Daerah, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
 - b. Mutasi dan Promosi ASN;
 - c. Pengembangan Kompetensi ASN; dan
 - d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

I.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Renja 2023 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5671);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomer 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberap kali dan berakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 28 September 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 136).

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

I.3.1 MAKSUD

- a. Pedoman dan dasar penyusunan Kegiatan Tahun 2023.
- b. Acuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tahun 2023.

I.3.2 TUJUAN

- a. Penjabaran atas Rencana Strategis Perencanaan Pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2018-2023,

dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran indikatif.

- b. Menyelaraskan program kerja Badan Kepagawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 dengan program nasional di bidang kepegawaian, program kabupaten/kota, isu-isu strategis, usulan-usulan pada forum Musrenbang yang dilakukan secara berjenjang, serta saran masukan dari berbagai pemangku kepentingan di bidang kepegawaian.

I.4 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RENJA

Dokumen Perubahan Renja 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Dokumen Renja

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

- II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III. Tujuan dan Sasaran Renja

- III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- III.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- III.3 Program dan Kegiatan

Bab IV. Rencana Program dan Kegiatan

Bab V. Penutup

Lampiran

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaksanaan Renja OPD dikaitkan juga dengan pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023, berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021.

TABEL 1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

KODE	URAIAN	KINERJA		ANGGARAN	REALISASI	%
		INDIKATOR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7
5.03	KEPEGAWAIAN			16.581.361.247	15.915.167.949	95,98
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			12.465.485.365	12.360.010.237	99,15
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			57.849.095	57.839.525	99,98
5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen)	1	10.809.510	10.808.800	99,99
5.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	18.492.661	18.491.800	100,00
5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	1	15.079.955	15.079.200	99,99
5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	2	13.466.969	13.459.725	99,95
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.498.473.261	10.405.775.017	99,12
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	12	9.906.615.540	9.821.645.670	99,14
5.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Bulan)	3	573.697.120	565.969.572	98,65

KODE	URAIAN	KINERJA		ANGGARAN	REALISASI	%
		INDIKATOR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7
5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu (Laporan)	2	18.160.601	18.159.775	100,00
5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.892.671	5.890.850	99,97
5.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)	1	5.892.671	5.890.850	99,97
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			19.419.669	18.542.650	95,48
5.03.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	10.844.954	10.761.000	99,23
5.03.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Individu (Dokumen)	80	5.869.715	5.676.650	96,71
5.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Minimal 20 JP (Orang)	15	1.870.000	1.300.000	69,52
5.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi (Orang)	2	550.000	520.000	94,55
5.03.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek (Orang)	10	285.000	285.000	100,00
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			655.187.646	652.939.145	99,66

KODE	URAIAN	KINERJA		ANGGARAN	REALISASI	%
		INDIKATOR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Item)	7	17.064.770	17.059.500	99,97
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	10	99.933.525	99.928.525	99,99
5.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga (Jenis)	12	127.718.531	127.717.050	100,00
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Item)	30	145.625.525	145.335.125	99,80
5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Jenis)	2	30.000.000	30.000.000	100,00
5.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Kunjungan Tamu yang Difasilitasi (Persen)	100	88.500.000	88.460.000	99,95
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	14	125.380.396	123.476.145	98,48
5.03.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang diolah (Jenis)	5	10.481.338	10.480.775	99,99
5.03.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem yang Dikelola (Sistem Informasi)	10	10.483.561	10.482.025	99,99
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			755.283.010	750.586.010	99,38
5.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebelair (Buah)	54	114.622.950	114.086.750	99,53

KODE	URAIAN	KINERJA		ANGGARAN	REALISASI	%
		INDIKATOR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7
5.03.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Item)	7	640.660.060	636.499.260	99,35
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			125.155.348	121.811.940	97,33
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang Dikirim (Berkas)	50	2.466.355	1.683.000	68,24
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12	25.000.000	22.443.540	89,77
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Persen)	100	97.688.993	97.685.400	100,00
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			348.224.665	346.625.100	99,54
5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang Disediakan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)	3	67.729.165	66.135.600	97,65
5.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan yang dipelihara (Unit)	150	280.495.500	280.489.500	100,00

KODE	URAIAN	KINERJA		ANGGARAN	REALISASI	%
		INDIKATOR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			4.115.875.882	3.555.157.712	86,38
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			1.029.465.689	1.022.897.510	99,36
5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (dokumen)	1	75.850.552	75.850.552	100,00
5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi penerimaan CASN serta seluruh rangkaian pengadaan (orang)	7000	544.826.050	538.795.878	98,89
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	1	134.474.451	134.474.451	100,00
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Dewan Pengurus Korpri (Laporan)	1	113.793.212	113.255.205	99,53
5.03.02.1.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN (Dokumen)	1	747.966	747.966	100,00
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem Informasi Kepegawaian yang Dikelola (Sistem Informasi)	1	21.286.438	21.286.438	100,00

KODE	URAIAN	KINERJA		ANGGARAN	REALISASI	%
		INDIKATOR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Pengelolaan Data Kepegawaian (Persen)	100	131.306.272	131.306.272	100,00
5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	7.180.748	7.180.748	100,00
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN			1.487.270.672	956.835.120	64,33
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Mutasi ASN (Dokumen)	1	81.974.113	81.974.113	100,00
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	6	363.350.264	350.659.122	96,51
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas (Dokumen)	8	1.041.946.295	524.201.885	50,31
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Kinerja PNS Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Dokumen)		1.212.187.403	1.188.672.964	98,06
5.03.02.1.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Kinerja PNS Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Dokumen)	3	26.954.849	26.954.849	100,00

KODE	URAIAN	KINERJA		ANGGARAN	REALISASI	%
		INDIKATOR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Kompetensi dan Potensi PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Dokumen)	200	185.276.621	185.276.621	100,00
5.03.02.1.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Pelaksanaan fasilitasi administrasi penetapan calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas dan Latihan Dasar CPNS di lingkungan Pemprov. Kalbar (Dokumen)	10	613.722.397	600.372.416	97,82
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendidikan Lanjutan PNS Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Dokumen)	30	220.155.544	217.934.944	98,99
5.03.02.1.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional (Kegiatan)	2	31.159.517	30.958.517	99,35
5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jabatan Fungsional (Dokumen)	3	75.383.067	75.043.367	99,55
5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Pejabat Fungsional yang Dilakukan Pengangkatan, Pelantikan, Kenaikan, Alih Dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional (Orang)	400	59.535.408	52.132.250	87,57

KODE	URAIAN	KINERJA		ANGGARAN	REALISASI	%
		INDIKATOR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			386.952.118	386.752.118	99,95
5.03.02.1.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Dokumen)	1	17.444.302	17.444.302	100,00
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Peresentase Penyampaian Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Persen)	100	11.153.466	11.153.466	100,00
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Pegawai yang diberikan penghargaan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat/Kabupaten/Kota (Orang)	400	82.974.278	82.974.278	100,00
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Dokumen Pembinaan Disiplin ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Dokumen)	1	200.174.694	199.974.694	99,90
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah SK penyelesaian pelanggaran disiplin ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (SK)	10	75.205.378	75.205.378	100,00

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 umumnya menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan pada capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar Tahun 2021 dengan capaian indikator sebesar **69,97%** dengan persentase tingkat keberhasilan sebesar **104,44%**. Capaian tersebut menggambarkan keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah sesuai dengan harapan pada tahun 2021. Namun kedepannya diperlukan konsistensi dan upaya lebih dalam pencapaian target kinerja pada tahun-tahun selanjutnya mengingat masih merebaknya Pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan baik di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Capaian indikator tersebut mengacu pada RPJMD Prov. Kalbar 2018-2023 serta Renstra Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar 2018-2023 yang telah disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih sebelumnya. Pada Tahun 2019 juga merupakan tahun awal penerapan pencapaian indikator kinerja OPD yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah ditandatangani bersama Gubernur Terpilih.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 akan dilihat pada pencapaian indikator dan analisisnya pada IKU Dinas Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar. Capaian kinerja utama TA 2021 adalah sebagai berikut:

TABEL 2. Capaian Target IKU BKD Prov. Kalbar Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja Tahun 2021		Tingkat Kemajuan (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	1.1	Persentase Aparatur sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	67	69,97	104,44
RERATA CAPAIAN KINERJA SS 1						104,44

Sumber : BKD Prov. Kalbar 2022.

- **Persentase Aparatur sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan**

Indikator tersebut merupakan penjabaran dari misi ke 2 Kepala Daerah terpilih periode 2018-2023 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance” yang telah mengalami perubahan terhadap indikator sebelumnya yang disebabkan oleh hasil dari evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Ditengah masih merebaknya Pandemi Covid-19 di seluruh Indonesia sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan baik di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, diperlukannya inovasi-inovasi terutama berkaitan dengan peningkatan profesionalitas ASN dalam pencapaian kinerja tahun berikutnya. Salah satu hambatan yang ditemu dalam pencapaian indikator yaitu masih terdapatnya penundaan pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta kurang informatifnya instansi Pembina jabatan fungsional terhadap peraturan tentang jabatan fungsional. Selain hal tersebut, adanya refocusing anggaran yang dilakukan beberapa kali selama masa Pandemi Covid-19 menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan terutama dalam rangka mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan diatas diantaranya mendorong OPD untuk mengalokasikan penganggaran dalam rangka pengembangan karir jabatan fungsional. Selain itu juga mendorong dilakukannya diklat jabatan fungsional dilakukan melalui mekanisme online melalui zoom sehingga memudahkan peserta mengikuti diklat.

Selain itu juga dilakukan komunikasi secara intens terhadap Instansi Pembina Jabatan Fungsional agar informasi tentang pembinaan jabatan fungsional dapat diterima Pemerintah Provinsi Kalbar lebih update, dan juga upaya yang dilakukan yaitu selalu aktif mencari informasi terkait dengan jabatan fungsional melalui masing-masing website instansi Pembina jabatan fungsional.

Tahun 2019 merupakan tahun awal penggunaan indikator yang telah ditetapkan baik pada RPJMD Prov. Kalbar 2018-2023 maupun Renstra Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar 2018-2023 dimana pada Tahun 2018 masih menggunakan indikator yang tertuang pada periode Renstra sebelumnya. Indikator kinerja serta pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kalbar beserta pencapaiannya pada tahun 2019 - 2021 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.Target dan Capaian Target IKU BKD Prov. Kalbar Tahun 2019– 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		SATUAN	Realisasi					
					2019		2020		2021	
					T	R	T	R	T	R
1	2	3		4	5		6		7	
1	MENINGKATNYA PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA	1.1	Persentase Aparatur sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	%	59	62,65	79,00	64,5	67	69,97

Keterangan : T = Target ; R = Realisasi

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 136), Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas pokok, membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah pada bidang kepegawaian daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan program kerja di bidang kepegawaian daerah;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi Aparatur Sipil Negara, pengembangan Aparatur Sipil Negara, serta data disiplin dan KORPS Aparatur Sipil Negara;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan dan mutasi aparatur sipil Negara, pengembangan Aparatur Sipil Negara, serta data, disiplin dan KORPS Aparatur Sipil Negara;
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang kepegawaian daerah;
- e. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kepegawaian Daerah;
- h. Pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian Daerah;
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang kepegawaian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, ada beberapa indikator kinerja guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Provinsi Kalimantan Barat;
2. Peningkatan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Peningkatan Pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dari Indikator Kinerja diatas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat berupaya untuk meningkatkan kualitas aparaturnya melalui pengembangan kompetensi dengan mengikuti diklat, bimtek, workshop, sosialisasi dan seminar. Disamping itu juga diharapkan dengan keterampilan yang telah dimiliki dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga apa yang dicitakan dan diharapkan sebagai penyelenggara khususnya bidang kepegawaian dapat terwujud.

II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggung-jawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang

akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pembinaan dan administrasi pelayanan kepegawaian baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan telaahan rencana strategis dari kementerian atau lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Isu-isu strategis pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah:

- a. Belum optimalnya implementasi Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara;
- b. Masih kurangnya tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil;
- c. Penerapan E-Government;
- d. Belum maksimalnya penerapan Sistem Penilaian Kinerja secara berbasis elektronik;
- e. Pemetaan Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal sesuai dengan kompetensinya dan penerapan pelaksanaan uji kompetensi.

Tujuan yang telah dirumuskan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah: Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur ; Sasaran yang ingin dicapai dalam manajemen kepegawaian adalah:

1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara;
2. Meningkatkan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Meningkatkan pemenuhan hak-hak kepegawaian Aparatur Sipil Negara; dan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Adminitrasi Kepegawaian; dan
5. Meningkatkan kualiatas pelayanan Internal

Strategi yang dilakukan untuk mendukung tujuan dan sasaran organisasi adalah:

1. Meningkatkan SDM aparatur sipil negara untuk pengembangan karier aparatur sipil negara berdasarkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan fungsional, teknis dan pelatihan manajerial;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan Pegawai Negeri Sipil melalui beasiswa tugas belajar ;
3. Meningkatkan kualitas kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui uji kompetensi;
4. Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku Aparatur Sipil Negara;
5. Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil Negara melalui pemenuhan kebutuhan hak-hak kepegawaian Aparatur Sipil Negara;

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD Provinsi dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun 1 (satu) tahun

Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang telah disusun sebagai tahun keempat pencapaian RPJMD Kalbar 2018-2023 yang telah mengakomodir kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Terpilih. Namun terdapat penyesuaian antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dan Renja OPD Tahun 2023 dimana dalam penyusunan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang maksimal, adil dan merata bagi masyarakat dengan penganggaran yang efisien.

Penyusunan Rancangan Awal Renja disusun tanpa mengalokasikan pagu anggaran per sub kegiatan yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (sesuai SE MENPAN 2021)	Target Sub Kegiatan Tahun 2023	Lokasi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	Pontianak	Februari - Desember
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	1	Pontianak	Juli - September
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	1	Pontianak	Januari - Maret
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	1	Pontianak	Mei - September

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (sesuai SE MENPAN 2021)	Target Sub Kegiatan Tahun 2023	Lokasi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	3	Pontianak	Januari - Maret
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	1	Pontianak	Januari - Maret
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	82	Pontianak	Januari - Desember
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	Pontianak	Januari - Desember
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1	Pontianak	Januari - Desember

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (sesuai SE MENPAN 2021)	Target Sub Kegiatan Tahun 2023	Lokasi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	4	Pontianak	Januari - Desember
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	1	Pontianak	Juli - September
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(laporan)	1	Pontianak	Januari - Desember
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)	82	Pontianak	Januari - April
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	Pontianak	Januari - Desember
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	82	Pontianak	Januari - Desember

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (sesuai SE MENPAN 2021)	Target Sub Kegiatan Tahun 2023	Lokasi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	20	Pontianak	Januari - Desember
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	5	Pontianak	Januari - Desember
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	10	Pontianak	Januari - Desember
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	7	Pontianak	Januari - Desember
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	10	Pontianak	Januari - Desember
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	14	Pontianak	Januari - Desember

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (sesuai SE MENPAN 2021)	Target Sub Kegiatan Tahun 2023	Lokasi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	20	Pontianak	Januari - Desember
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen)	192	Pontianak	Januari - Desember
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	1	Pontianak	Januari - Desember
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	20	Pontianak	Januari - Desember
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(dokumen)	1	Pontianak	Januari - Desember
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	1	Pontianak	Januari - Desember
Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (paket)	50	Pontianak	Januari - Maret

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (sesuai SE MENPAN 2021)	Target Sub Kegiatan Tahun 2023	Lokasi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	20	Pontianak	Januari - Maret
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	2	Pontianak	Januari - Maret
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1	Pontianak	Januari - Maret
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1	Pontianak	Januari - Maret
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	1	Pontianak	Januari - Maret
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)	3	Pontianak	Januari - Maret

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (sesuai SE MENPAN 2021)	Target Sub Kegiatan Tahun 2023	Lokasi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
	Dinas Jabatan				
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	20	Pontianak	Januari - Maret
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	150	Pontianak	Januari - Maret
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN (dokumen)	1	Pontianak	Januari - Desember
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (dokumen)	2	Pontianak	Januari - Desember
	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (dokumen)	1	Pontianak	Januari - Desember

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (sesuai SE MENPAN 2021)	Target Sub Kegiatan Tahun 2023	Lokasi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN(laporan)	1	Pontianak	Januari - Desember
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (lembaga)	1	Pontianak	Januari s.d Desember
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN (dokumen)	1	Pontianak	Januari s.d Desember
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)	1	Pontianak	Januari s.d Desember
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (dokumen)	1	Pontianak	Januari s.d Desember
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (laporan)	1	Pontianak	Januari s.d Desember

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (sesuai SE MENPAN 2021)	Target Sub Kegiatan Tahun 2023	Lokasi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah (dokumen)	7	Pontianak	Januari s.d Desember
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (laporan)	6	Pontianak	Januari s.d Desember
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (dokumen)	8	Pontianak	Januari - Desember
Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	50	Kota Pontianak	Januari s.d Desember
	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (dokumen)	200	Kota Pontianak	Januari s.d Desember
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (dokumen)	3	Jakarta, Jatim dan Jateng	Januari s.d Desember

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (sesuai SE MENPAN 2021)	Target Sub Kegiatan Tahun 2023	Lokasi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola (dokumen)	4	Jogjakarta, Jakarta, Bali, Semarang, Makasar, Thailand, Malang, Bogor, Solo	Januari s.d Desember
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat(dokumen)	3	Jakarta, Jatim dan Jateng	Januari s.d Desember
	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN (orang)	30	Pontianak	Januari s.d Desember
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN (laporan)	2	Pontianak	Januari s.d Desember
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina (orang)	400	Pontianak	Januari s.d Desember
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional (dokumen)	450	Pontianak	Januari s.d Desember

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (sesuai SE MENPAN 2021)	Target Sub Kegiatan Tahun 2023	Lokasi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (dokumen)	10.000	Pontianak	Januari s.d Desember
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (laporan)	1	Pontianak	Januari s.d Desember
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (orang)	400	Pontianak	Januari s.d Desember
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (orang)	8.755	Pontianak	Januari s.d Desember
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (laporan)	10	Pontianak	Januari s.d Desember
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (dokumen)	1	Pontianak	Januari s.d Desember

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sasaran pembangunan bidang aparatur Negara mengacu pada arah pembangunan bidang aparatur negara tahap keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2005-2025 yaitu terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Sasaran tersebut didukung oleh ASN profesional, berintegritas, dan netral, pola hubungan kerja antar unit organisasi pemerintah, antara pemerintah dan masyarakat yang kolaboratif dan inklusif, organisasi birokrasi yang responsif dan adaptif, serta pelayanan publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan.

Sasaran pembangunan bidang aparatur Negara mencakup beberapa arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, dengan arah kebijakan memperkuat implementasi sistem merit dalam manajemen ASN;
2. Terwujudnya arsitektur jaringan kerja pemerintahan yang kolaboratif dan inklusif, dengan arah kebijakan penataan proses bisnis internal instansi pemerintah, antar instansi pemerintah dan institusi pemerintah dengan non-pemerintah serta pelibatan masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik;
3. Terwujudnya organisasi yang responsif dan adaptif, dengan arah kebijakan penataan organisasi pemerintah berbasis pada prioritas pembangunan nasional;
4. Terwujudnya pelayanan publik yang berorientasi pada perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan, dengan arah kebijakan memperluas penerapan inovasi dalam pelayanan publik.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Rencana Strategis 2018-2023 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, terdapat 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran yang dituangkan pada Rencana Kerja tahun 2021 sebagai bentuk penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah Terpilih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih :

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat yaitu pada Misi ke- 2 yaitu : **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*** yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).

Sedangkan BKD Prov. Kalbar dalam Renja Tahun 2023 sesuai dengan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra BKD Prov. Kalbar 2018-2023 fokus pada **penempatan aparatur yang profesional sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan standar kompetensi jabatan** dimana target pada tahun 2023 sebesar **79%**. Terdapat penyesuaian kembali terhadap target indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar

dimana hal tersebut dilakukan akibat perubahan RPJMD Prov. Kalbar serta menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang tengah dihadapi saat ini.

Perubahan terhadap target tersebut melihat dari pencapaian terhadap indikator tahun 2021 serta tahun 2022 yang sedang berjalan sehingga dilakukan revisi terhadap target pencapaian indikator kinerja utama yang telah diakomodir dalam RPJMD Perubahan Tahap 2 tahun 2018-2023 Provinsi Kalimantan Barat.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut dijabarkan dalam pencapaian target Indikator Kinerja Program yaitu :

1. Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur; dan
2. Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin PNS.

III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Isu-isu penting, RKPD Tahun 2023 dan tujuan serta sasaran Tahun 2023, maka Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar pada tahun 2023 terdiri atas 2 (dua) program, 12 (duabelas) kegiatan, serta 61 (enam puluh tiga) sub kegiatan dimana rincian rencana kerja ini telah disusun, diinput pada aplikasi SIPD, serta telah di asistensi oleh Bappeda Prov. Kalbar.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dokumen Rencana Kerja memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya yang meliputi indikator input, output dan outcome, juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program serta keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Instrumen kebijakan yang dijadikan acuan untuk mencapai tujuan dan akan menjadi dasar perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan operasional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat terangkum dalam beberapa program serta dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan.

Dengan program dan kegiatan serta pendanaan yang telah disusun pada tahun 2023, ditujukan agar dapat mencapai target capaian kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar baik untuk Indikator Kinerja Utama (Indikator Eselon II), Indikator Kinerja Program (Indikator Eselon III), dan Indikator Kinerja Kegiatan (Indikator Eselon IV)

Selanjutnya penjabaran perubahan program/kegiatan, pendanaan, serta target kinerja masing-masing kegiatan dapat dilihat pada **lampiran** Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini dimana pada lampiran tersebut telah terinci perbandingan perubahan program/kegiatan/sub kegiatan pada kegiatan prioritas beserta anggaran yang telah disusun dalam rincian perubahan rencana kerja yang telah diinputkan pada aplikasi SIPD.

Tabel 5. Hasil Penginputan Rancangan awal dan Rincian Renja 2023 BKD Prov. Kalbar
Pada Aplikasi SIPD

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (sesuai SE MENPAN 2021)	Target Sub Kegiatan Tahun 2023	Lokasi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Rencana Anggaran	Rincian Renja 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
						6.478.317.520	16.504.407.990
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	Pontianak	Februari - Desember	18.241.400	23.041.400
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	1	Pontianak	Juli - September	16.694.400	15.594.400
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	1	Pontianak	Januari - Maret	19.906.200	12.962.600
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	1	Pontianak	Mei - September	15.000.000	9.322.300

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (sesuai SE MENPAN 2021)	Target Sub Kegiatan Tahun 2023	Lokasi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Rencana Anggaran	Rincian Renja 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	3	Pontianak	Januari - Maret	19.195.100	18.095.100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	1	Pontianak	Januari - Desember	24.060.200	28.482.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	82	Pontianak	Januari - Desember	-	10.389.587.370
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	Pontianak	Januari - Desember	213.780.000	229.560.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1	Pontianak	Januari - Desember	3.236.000	2.934.600

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (sesuai SE MENPAN 2021)	Target Sub Kegiatan Tahun 2023	Lokasi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Rencana Anggaran	Rincian Renja 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	4	Pontianak	Januari - Desember	57.019.500	57.019.500
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	1	Pontianak	Juli - September	4.000.000	2.637.600
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(laporan)	1	Pontianak	Januari - Desember	23.519.600	21.902.100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)	94	Pontianak	Januari - April	75.200.000	66.611.300
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	Pontianak	Januari - Desember	50.614.400	30.319.600

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (sesuai SE MENPAN 2021)	Target Sub Kegiatan Tahun 2023	Lokasi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Rencana Anggaran	Rincian Renja 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	82	Pontianak	Januari - Desember	3.064.300	49.184.300
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	20	Pontianak	Januari - Desember	22.000.000	22.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	5	Pontianak	Januari - Desember	2.420.000	2.420.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	10	Pontianak	Januari - Desember	9.975.000	9.975.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	7	Pontianak	Januari - Desember	19.024.500	18.410.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	10	Pontianak	Januari - Desember	141.012.200	115.892.200

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (sesuai SE MENPAN 2021)	Target Sub Kegiatan Tahun 2023	Lokasi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Rencana Anggaran	Rincian Renja 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	14	Pontianak	Januari - Desember	62.841.400	52.641.400
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	20	Pontianak	Januari - Desember	127.840.400	121.473.500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	3600	Pontianak	Januari - Desember	24.000.000	30.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	1	Pontianak	Januari - Desember	95.280.000	95.280.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	14	Pontianak	Januari - Desember	82.816.000	82.816.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	1	Pontianak	Januari - Desember	25.262.300	25.262.300

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (sesuai SE MENPAN 2021)	Target Sub Kegiatan Tahun 2023	Lokasi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Rencana Anggaran	Rincian Renja 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD(dokumen)	1	Pontianak	Januari - Desember	23.449.500	53.458.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	20	Pontianak	Januari - Maret	164.163.000	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	2	Pontianak	Januari - Maret	74.800.000	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1	Pontianak	Januari - Desember	22.300.000	22.300.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1	Pontianak	Januari - Desember	1.000.000	1.000.000

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (sesuai SE MENPAN 2021)	Target Sub Kegiatan Tahun 2023	Lokasi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Rencana Anggaran	Rincian Renja 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	1	Pontianak	Januari - Desember	427.017.120	391.397.760
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)	2	Pontianak	Januari - Desember	45.420.000	50.010.000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	40	Pontianak	Januari - Desember	20.000.000	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	150	Pontianak	Januari - Desember	89.315.780	91.622.060
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN (dokumen)	1	Pontianak	Januari - Desember	10.000.000	10.000.000
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (dokumen)	2	Pontianak	Januari - Desember	75.850.500	75.850.500

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (sesuai SE MENPAN 2021)	Target Sub Kegiatan Tahun 2023	Lokasi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Rencana Anggaran	Rincian Renja 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (dokumen)	1	Pontianak	Januari - Desember	173.117.920	173.117.900
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN (dokumen)	1	Pontianak	Januari - Desember	124.949.500	124.949.500
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (lembaga)	1	Pontianak	Januari s.d Desember	215.319.900	160.751.600
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN(dokumen)	1	Pontianak	Januari s.d Desember	42.316.700	42.322.700
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)	1	Pontianak	Januari s.d Desember	187.411.200	187.716.200
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (dokumen)	1	Pontianak	Januari s.d Desember	135.705.200	135.545.800

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (sesuai SE MENPAN 2021)	Target Sub Kegiatan Tahun 2023	Lokasi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Rencana Anggaran	Rincian Renja 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (laporan)	1	Pontianak	Januari s.d Desember	23.952.300	24.007.400
Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah (dokumen)	7	Pontianak	Januari s.d Desember	81.974.000	81.974.000
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (laporan)	6	Pontianak	Januari s.d Desember	309.673.500	299.003.400
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (dokumen)	8	Pontianak	Januari - Desember	809.679.250	806.539.100
Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	50	Kota Pontianak	Januari s.d Desember	43.363.400	41.807.100
	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (dokumen)	800	Kota Pontianak	Januari s.d Desember	270.869.200	250.890.200

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (sesuai SE MENPAN 2021)	Target Sub Kegiatan Tahun 2023	Lokasi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Rencana Anggaran	Rincian Renja 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (dokumen)	3	Jakarta, Jatim dan Jateng	Januari s.d Desember	648.972.000	639.486.400
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola (dokumen)	4	Jogyakarta, Jakarta, Bali, Semarang, Makasar, Thailand, Malang, Bogor, Solo	Januari s.d Desember	506.725.100	488.691.100
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (dokumen)	3	Jakarta, Jatim dan Jateng	Januari s.d Desember	66.576.400	53.458.600
	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN (orang)	30	Pontianak	Januari s.d Desember	17.500.000	16.682.600
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN (laporan)	2	Pontianak	Januari s.d Desember	66.406.400	66.398.500
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina (orang)	200	Pontianak	Januari s.d Desember	53.005.250	52.835.000

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (sesuai SE MENPAN 2021)	Target Sub Kegiatan Tahun 2023	Lokasi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Rencana Anggaran	Rincian Renja 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional(dokumen)	450	Pontianak	Januari s.d Desember	110.000.000	105.221.400
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (dokumen)	1	Pontianak	Januari s.d Desember	15.307.600	13.145.000
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (dokumen)	10.000	Pontianak	Januari s.d Desember	91.735.500	81.793.900
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (orang)	5	Pontianak	Januari s.d Desember	-	54.568.300
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (orang)	400	Pontianak	Januari s.d Desember	54.443.800	54.443.800
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (orang)	8.755	Pontianak	Januari s.d Desember	138.535.300	138.535.300
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (laporan)	10	Pontianak	Januari s.d Desember	131.778.200	90.797.000

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (sesuai SE MENPAN 2021)	Target Sub Kegiatan Tahun 2023	Lokasi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Rencana Anggaran	Rincian Renja 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (dokumen)	1	Pontianak	Januari s.d Desember	49.681.100	49.681.100
	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (dokumen)	1	Pontianak	Januari s.d Desember	-	40.981.200

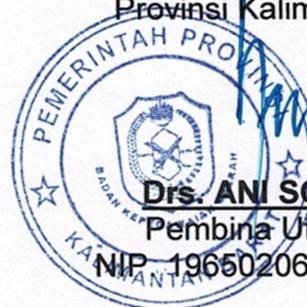
BAB 5 PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 (Renja 2023) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Perubahan Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Prov.Kalbar Tahun 2023 memuat kebijakan program dan kegiatan yang berorientasi pada Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Renja sebagai pedoman bagi BKD Prov. Kalbar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dibawah Pembinaan Gubernur Kalimantan Barat. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu terkait dengan perubahan aturan terkait kinerja aparatur, diharapkan adanya inovasi-inovasi yang dapat dilakukan dan diterapkan oleh OPD maupun individu sehingga kinerja pegawai tetap maksimal dan pencapaian target OPD dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sebagai akhir kata, kami beserta segenap aparat di jajaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengharapkan agar Perubahan Renja Tahun 2023 ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan DPA Perubahan Tahun 2023 serta dapat pula digunakan oleh segenap *stakeholders* dan sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Barat,



Drs. ANI SOFIAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650206 198603 1 018

Lampiran

Perubahan Renja BKD. Prov. Kalbar TA. 2023

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7
5.03	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar				17.203.029.150	18.862.247.834
5.03.01.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				12.847.064.541	13.155.500.434
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				107.498.300	52.598.300
5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	2	23.041.400	6.241.400
5.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	1	1	15.594.400	4.394.400
5.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	1	1	12.962.600	11.462.600
5.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	1	1	9.322.300	9.322.300

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7
5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	3	3	18.095.100	15.095.100
5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	4	4	28.482.500	6.082.500
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.408.983.170	10.876.728.770
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	82	82	11.119.469.070	10.624.114.670
5.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	12	229.560.000	229.560.000
5.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1	1	2.934.600	2.934.600

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7
5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	4	4	57.019.500	20.119.500
5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				24.539.700	8.139.700
5.03.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	1	1	2.637.600	2.637.600
5.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	1	1	21.902.100	5.502.100
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				180.512.600	117.969.600
5.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)	86	86	64.500.000	57.577.000
5.03.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	30.319.600	14.619.600

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7
5.03.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	82	82	51.298.000	11.378.000
5.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	20	20	22.000.000	22.000.000
5.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	5	5	2.420.000	2.420.000
5.03.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	10	10	9.975.000	9.975.000
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				580.816.791	957.170.980
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	7	7	18.410.500	18.410.500

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	10	10	115.892.200	146.029.200
5.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	14	14	52.641.400	57.151.400
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	20	20	121.473.500	216.734.500
5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(dokumen)	3600	3600	30.000.000	30.000.000
5.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	1	1	95.280.000	67.200.000
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	14	40	68.398.891	376.723.800
5.03.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	1	1	25.262.300	15.562.300

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7
5.03.01.1.06.11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	1	1	53.458.000	29.359.200
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				62.800.000	694.093.500
5.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (paket)	0	2	-	54.534.900
5.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	0	14	0	576.758.600
5.03.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	2	2	62.800.000	62.800.000
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				340.209.660	284.095.264
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1	1	22.300.000	22.300.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	1	0	1.000.000	-
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	1	1	316.909.660	261.795.264
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				141.704.320	164.704.320
5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)	2	2	50.010.000	60.010.000
5.03.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebelair	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	0	1	0	3.000.000
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	150	150	91.694.320	101.694.320
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				4.355.964.609	5.706.747.400

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1.170.180.000	2.187.704.300
5.03.02.1.01.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN (dokumen)	1	1	33.404.300	16.804.300
5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (dokumen)	2	2	320.968.500	267.468.500
5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (dokumen)	1	1	173.117.900	1.405.064.900
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN (dokumen)	1	1	105.531.200	29.031.200
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (lembaga)	1	1	160.751.600	135.251.600
5.03.02.1.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN (dokumen)	1	0	42.322.700	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)	4	4	187.716.200	187.716.200
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (dokumen)	1	1	128.750.200	128.750.200
5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (laporan)	1	1	17.617.400	17.617.400
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN				991.886.600	1.411.124.500
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah (dokumen)	7	7	81.974.000	16.374.000
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (laporan)	6	6	115.873.500	271.871.400
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (dokumen)	8	8	794.039.100	1.122.879.100

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN				1.715.468.709	1.666.576.700
5.03.02.1.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)	50	0	0	0
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (dokumen)	800	800	279.874.000	239.577.800
5.03.02.1.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (dokumen)	3	3	565.228.600	499.241.100
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola (dokumen)	4	4	575.770.009	702.993.100
5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (dokumen)	3	3	53.458.600	56.677.200
5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN (orang)	30	30	16.682.600	5.732.600
5.03.02.1.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN (laporan)	2	2	66.398.500	59.098.500

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7
5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina (orang)	200	200	52.835.000	19.985.000
5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional (dokumen)	450	450	105.221.400	92.271.400
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				478.429.300	411.341.900
5.03.02.1.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (dokumen)	1	1	13.145.000	1.200.000
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (dokumen)	10.000	10.000	81.793.600	95.461.300
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (orang)	5	5	52.338.300	61.248.300
5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (orang)	400	400	52.986.600	52.986.600

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (orang)	8.755	8.755	133.825.300	119.005.200
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (laporan)	10	10	84.647.000	89.197.000
5.03.02.1.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (dokumen)	1	1	33.631.100	12.231.100
5.03.02.1.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (laporan)	1	1	26.062.400	10.012.400